

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN OLEH INDUSTRI MIE SOON DALAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DESA MANJUNG
KABUPATEN KLATEN**



Diajukan oleh :

Dyah Inggid Sekar Putih

NPM	: 160512578
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN OLEH INDUSTRI MIE SOON DALAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DESA MANJUNG
KABUPATEN KLATEN**



Diajukan oleh :

Dyah Inggid Sekar Putih

NPM	: 160512578
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Pada Tanggal 12 Mei 2020**

Dosen Pembimbing

Dr. Hyronimus Rhiti.S.H.,LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PELAKSANAAN DAN KEWAJIBAN OLEH INDUSTRI MIE SOUN
DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DESA
MANJUNG KABUPATEN KLATEN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Mei 2020
Tempat : Daring

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Hyronimus Rhiti, SH., M.Hum
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

Tanda Tangan




Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

MOTTO

*Akan selalu ada proses tempuh yang panjang. jangan takut patah, jangan takut jatuh atas
liku yang kau tempuh. Sabar, satu per satu
sebentar lagi akan sampai.*

-dyahinggid-



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kebesarannya yang senantiasa memberikan kelancaran dan perlindungan serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Pelaksanaan dan kewajiban oleh industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan Di Desa Manjung Kabupaten Klaten“. Penulisan ini disusun sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan Terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, inspirasi, dan motivasi hingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu maka, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

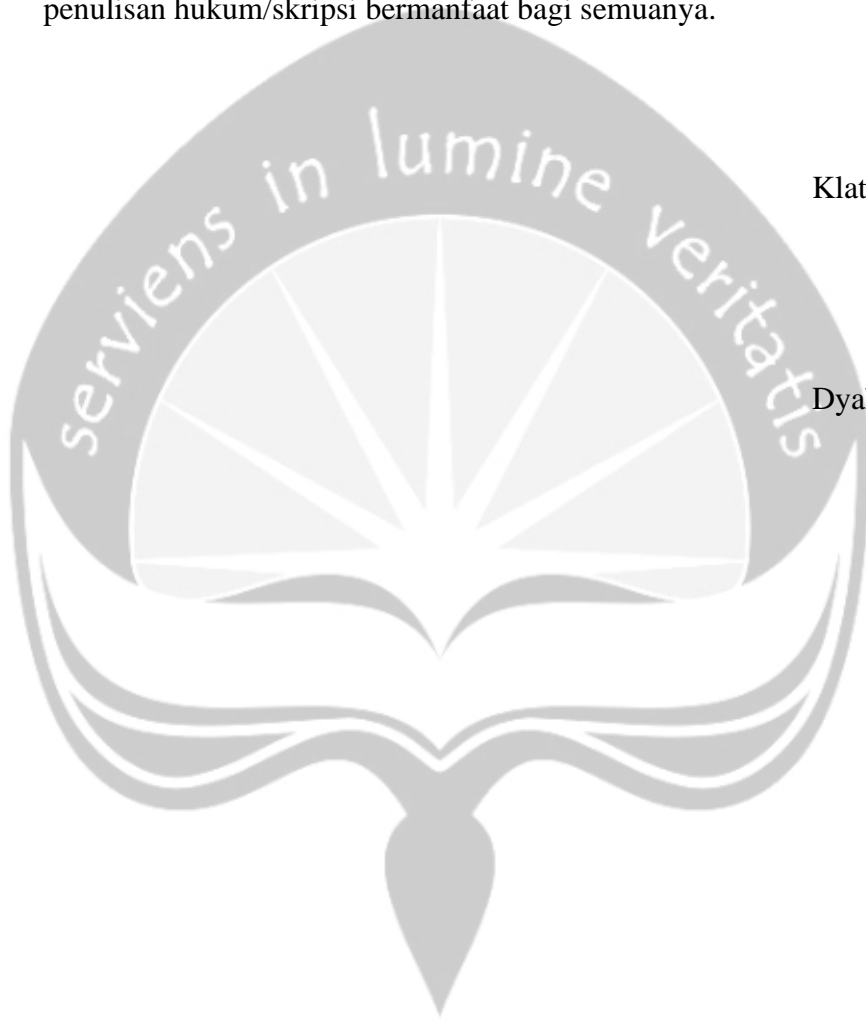
1. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatNya, memberikan kesempatan, kelancaran, kekuatan serta begitu banyak kemudahan untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. St. Mahendra Sony, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menuntun saya dalam pengambilan rencana studi setiap semester.
4. Bapak Dr. Hyronimus Rheti. S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan sabar dalam penulisan hukum/skripsi ini.
5. Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., S.H., M.Hum selaku ketua penguji ujian pendadaran, Dr. Hyronimus Rheti. SH., LL.M. selaku sekretaris penguji ujian pendadaran dan FX. Endro Susilo, S.H., LL.M selaku anggota penguji ujian pendadaran

6. Bapak Muhammad Ali, SE selaku kepala seksi pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Klaten dan Ibu Etik Sandrayati, S. Sos, M.Si selaku kepala seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.
7. Bapak Budi Kusyanto, S.Sos, MM selaku kepala bagian Umum Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
8. Bapak Kusmanto, Bapak Petruk, Bapak Joko, Bapak Supardi dan Bapak Ngatimin selaku para pelaku usaha mie soun yang telah membantu penulis dalam penelitian ini
9. Kepada Orang Tua saya Widada G, SH. Dan Heni Widiati yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat terhadap penulis
10. Saudara kandung Jessica Sekar Nila Sari dan saudara sepupu saya Roni Adi Wicaksono yang telah mendukung dalam penulisan hukum/skripsi ini.
11. Oryza Sativa yang senantiasa mendukung dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan penulisan hukum/skripsi ini setiap hari.
12. Sahabat-sahabat saya tersayang. Chika Ramadhani, Shalsabella Firdausia, Fadwa Nur Nafisah, Herawati alief, Karenina L, Aputri Anjulika, Mariza Rifka, Anisa Putri, Nirmala, Inaivanny Bonggoibo, Vellycia Tiana, Shinta Dewi, Ratri Rara, Wahyu Kurniawan Yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam penulisan hukum/skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Angkatan 2016.
14. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
15. Kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan dedikasi dan ketulusannya membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritikan, dan saran berbagai pihak yang sifatnya membangun, sebagai perbaikan dan penyempurnaan. Ucapan Terima Kasih yang sangat tulus ini penulis haturkan, dan untuk selanjutnya semoga penulisan hukum/skripsi bermanfaat bagi semuanya.

Klaten, 23 April 2020

Dyah Inggid Sekar Putih



ABSTRACT

Glass noodles are a popular food in the community because of their affordable prices and good nutrition. The vermicelli noodle processing industry is usually carried out by small industries, in addition to providing the benefits of the vermicelli noodle industry, it also has a bad impact, namely the waste produced by the vermicelli noodle industry which causes pollution..

The purpose of this study was to determine the in implementation of pollution control obligations due to the activity of the vermicelli noodles industry. In this study using empirical legal research methods.

The problem in this research is how to control pollution caused by the vermicelli noodle industry in Manjung Village, Klaten Regency. the findings in this study are as follows: making glass noodles produce solid and liquid limbah, solid waste from glass noodles can still be used for worm cattle but the liquid waste is not treated first before being dumped into the river. this is what causes pollution.

The conclusion in this study is that pollution control has not been done well and the authors suggest that the authorities need to conduct counseling and supervision and encourage business actors to conduct WWTP to facilitate business actors.

Keywords: *glass noodle industry, waste, pollution control*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Skripsi.....	15
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Tinjauan Tentang Industri Mie Soun.....	15
1. Pengertian Industri Mie Soun.....	15
2. Macam – Macam Industri.....	17
3. Error! Bookmark not defined.	
B. Tinjauan Tentang Limbah dan Pencemaran Lingkungan.....	24
1. Pengertian Limbah.....	24
2. Jenis – Jenis Limbah.....	25
3. Error! Bookmark not defined.	6
C. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Mie Soun.....	35
1. Kondisi Industri Mie Soun.....	35
2. Limbah Industri Mie Soun.....	41
3. Error! Bookmark not defined.	43

4. Langkah Pengendalian.....	44
5. Kendala – Kendala Yang Dihadapi.....	50
BAB III.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
Daftar Pustaka	48
Lampiran	51



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Klaten 23 April 2020

Yang menyatakan,

Dyah Inggid Sekar Putih



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Kegiatan yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat terdapat di berbagai sektor. Kegiatan tersebut meliputi, pertambangan, pertanian, perikanan dan industri. Salah satu jenis kegiatan yang banyak dilakukan di berbagai daerah adalah kegiatan industri. Industri Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Kegiatan industri ini banyak menyerap tenaga kerja sehingga mampu berpengaruh angka pengangguran di daerah tersebut serta sektor industri juga banyak membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Semakin maju tingkat perkembangan kegiatan industri di suatu daerah, semakin banyak jumlah dan macam industri. Seringkali kegiatan industri mengakibatkan dampak lingkungan. Industri mempunyai dampak positif yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan namun seringkali kegiatan mempunyai dampak tersebut antara lain menimbulkan permasalahan limbah, baik limbah padat, cair dan ataupun gas. Limbah yang di akibatkan oleh kegiatan industri tersebut dapat menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara di sekitar lingkungan industri yang juga akan merugikan masyarakat sekitar serta berpotensi adanya pencemaran lingkungan.

Salah satu kegiatan industri yang menimbulkan pencemaran yaitu industri mie soun yang terdapat di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Industri mie soun tersebut

termasuk industri skala menengah. Diketahui limbah industri mie soun tersebut dibuang secara langsung ke aliran sungai, sehingga berdampak pada perairan pertanian lingkungan sekitar dan menimbulkan kerugian bagi petani di daerah tersebut.¹

Keberadaan limbah industri mie soun harus di kelola dengan baik dalam upaya mengantisipasi terjadinya pencemaran pada lingkungan sekitar dan meminimalisir kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamatkan, dalam Pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini pertanggungjawaban pencemaran lingkungan oleh adanya kegiatan industri mie soun di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten menjadi kewajiban pelaku kegiatan industri tersebut. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya, maka dari itu pertanggung jawaban pencemaran lingkungan oleh adanya

¹ Pengamatan penulis pada Tanggal 26 November 2019 mengunjungi pabrik industri mie soun.

kegiatan industri dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban hukum oleh pelaku kegiatan industri mie soun tersebut dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan.

Dalam realitanya, pelaku usaha kegiatan industri mie soun hingga saat ini tidak melakukan pengendalian pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan limbah kegiatan industri ini selalu menjadi keluhan masyarakat sekitar dan juga kerugian. Kerugian tersebut dikarenakan pembuangan limbah yang dialirkan secara langsung ke selokan ataupun ke sungai yang berdampak pada perairan yang digunakan untuk mengairi pertanian membuat tanah pertanian menjadi tercemar. Persoalan ini sampai sekarang belum ada solusi karena pelaksanaan hak dan kewajiban hukum oleh pelaku kegiatan industri mie soun belum dilakukan, hal ini menimbulkan akibat pencemaran dan kerugian bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik meneliti persoalan lingkungan terkait limbah industri dengan judul “Pelaksanaan kewajiban dari industri mie soun dalam pencegahan pencemaran lingkungan Di Desa Manjung Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban oleh pelaku kegiatan industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kewajiban oleh pelaku kegiatan industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan kewajiban dari kegiatan industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten.

2. Kendala dalam pelaksanaan kewajiban dari kegiatan industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan khususnya mengenai pelaksanaan dan kewajiban pengendalian pencemaran sebagai akibat dari kegiatan industri.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Klaten mengenai pelaksanaan dan kewajiban pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan industri dalam tujuan mencegah pencemaran lingkungan.

- b. Bagi pelaku usaha industri

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pemilik sektor industri agar dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan industri mie soun.

- c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat sekitar kawasan industri untuk berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan industri dalam rangka sebagai pengendalian pencemaran lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan dan Kewajiban hukum dari industri mie soun sebagai pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten klaten“ merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dan skripsi orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang mirip dengan rencana penulisan penulis yaitu:

1. Donny Indra Setyawan mahasiswa Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 130511216
 - a. Judul Skripsi

“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah”
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) “Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati?”;dan
 - 2) “Apakah kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah plastik di kabupaten Pati dan apa saja solusinya?”
 - c. Kesimpulan
 - 1) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dinilai belum efektif dan maksimal. Pengawasan belum menyentuh pabrik secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Bumi Indo Pati dan PT. Dua Putra, serta permasalahan perizinan lingkungan,

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap penagang jawab usaha pabrik yang melakukan pelanggaran.

- 2) Faktor-faktor pengawasan yang mempengaruhi dalam melakukan pengawasan dinilai sebagai penyebab pengawasan menjadi kurang efektif. Seperti halnya luas pengawasan yang dirasa cukup besar karena keterbatasan jumlah tenaga kerja, sarana dan prasarana yang tidak tersedia dan anggaran yang kurang memadai, kurangnya jumlah tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya, serta komitmen penanggung jawab usaha yang kurang sadar akan aturan dan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Hal-hal tersebut menjadi penyebab pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kurang efektif.

2. Ilham, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Nomor Induk Mahasiswa 1410112065

- a. Judul Skripsi

“Pelaksanaan Hukum Pengolahan Limbah Rumah Makan di Kota Padang”

- b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Hukum Pengolahan Limbah Rumah Makan Di Kota Padang?
- 2) Bagaimana Solusi Terhadap Kelemahan Dan Kendala Yang Ditemukan Dalam Pengolahan Limbah Rumah Makan Di kota Padang?

- c. Kesimpulan

Kegiatan usaha Rumah Makan yang ada di Kota Padang yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang harus mengendalikan limbah rumah makan supaya tidak berdampak bagi kesehatan dan fungsi lingkungan hidup. Pelaksanaan hukum pengolahan limbah rumah makan di kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh RM. Udang Kelong telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Pada tanggal 7 September 2017, Petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung ke Rumah-rumah makan yang ada di kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh RM. Udang Kelong yaitu limbah rumah makan tersebut melebihi baku mutu air limbah. RM Lamun Ombak dan RM Sederhana limbah rumah makannya masih dalam kategori yang tidak melebihi baku mutu limbah. Hingga saat ini rumah-rumah makan yang ada di Kota Padang yang tidak menaati ketentuan hukum dan izin lingkungan sebagaimana mestinya mendapatkan sanksi administrasi berupa peringatan dan saran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

3. Suciati Alfi Rokhani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 110510628
 - a. Judul Skripsi

“Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.
 - b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?
- 2) Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?

c. Kesimpulan

- 1) Langkah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan pemerintah .
- 2) Kendala- kendala yang di hadapi oleh pemilik industri adalah
 - a) Banyak pelaku usaha di industri mie soun yang bermodal kecil tidak wajib memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), sehingga tidak ada pengawasan dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
 - b) Sebagian besar industri mie soun berskala kecil, sehingga tidak mampu untuk membuat IPAL, karena beayanya sangat mahal.
 - c) Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani tegas memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar ketentuan.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya.²

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada Tanggal 23 Desember 2019.

2. Kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.³
3. Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan adalah di masukkannya makhluk hidup, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
4. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk jasa industri.
5. Mie Soun adalah mie halus yang dibuat dari pati. Setelah direbus atau direndam, sohun berwarna bening, bertekstur kenyal, dan memiliki permukaan yang licin. Di antara berbagai jenis pati yang bisa dijadikan bahan baku adalah pati kacang hijau, umbi (kentang, ubi jalar, tapioka), sagu, aren, dan midro (*ganyong*). Sohun berbeda dari bihun. Dijual dalam keadaan kering dan terlipat seperti sarang burung, sohun direbus atau direndam hingga agak lunak sebelum digunakan untuk berbagai masakan tumis dan sup. Sohun hampir-hampir tidak memiliki rasa, namun menyerap kaldu dan rasa bahan-bahan lain yang dimasak bersamanya. Tanpa direndam air lebih dulu, sohun bisa langsung digoreng hingga garing, dan dipakai sebagai alas atau penghias makanan.⁴

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu, penelitian hukum yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat. penelitian ini memerlukan data primer sebagai

³ *Ibid.*

⁴ Pengertian Mie Soun <https://id.wikipedia.org/wiki/Sohun>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

data utama dan di dukung dengan sata sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari keterangan responden melalui wawancara terkait dengan pelaksanaan dan kewajiban hukum oleh industri mie soun sebagai pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten (sebagai data utama) yang akan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- d) Peraturan Menteri Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri.

- e) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang di peroleh dari buku, laporan hasil penelitian, internet, responden dan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, laporan hasil penelitian, internet, responden dan narasumber.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha industri mie soun di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Lima sampel dari 40 populasi industri mie soun.

6. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian hukum ini adalah pelaku usaha industri mie soun dan beberapa warga sekitar yang berada di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan lima pelaku usaha industri mie soun yang dipilih menggunakan metode purposive, yaitu pengambilan dengan cara pertimbangan berdasarkan lokasi industri mie soun yang berdekatan dengan tempat terjadinya pencemaran.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Muhammad Ali, SE selaku kepala seksi pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
- b. Ibu Eti Sandrayati, S.Sos, M.Si selaku kepala seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
- c. Bapak Budi Kusyanto, S.Sos, MM selaku kepala bagian Umum Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tugas ilmu hukum normative atau dokmatif ada lima yaitu:

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu pemaparan atau uraian isi maupun struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi hukum positif secara vertikal yaitu ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah, tidak menunjukkan adanya antinomi. secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga tidak dibutuhkan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan non kontradiksi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, sudah terjadi harmonisasi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- 3) Analisis hukum positif dalam penelitian ini, yaitu memaparkan sistem peraturan perundang-undangan dan keputusan hukum sebagai landasan atas asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.
- 4) Interpretasi hukum positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tapi dalam penelitian ini yang digunakan hanya tiga yaitu:

- a) Gramatikal yaitu pengertian istilah yang digunakan dalam hukum positif berdasarkan bahasa sehari-hari yang lazim digunakan.
- b) Sistematisasi berdasarkan sistem aturan untuk mengartikan sesuatu ketentuan hukum baik secara vertikal ataupun horizontal, secara vertikal terdapat sinkronisasi dan secara horizontal terdapat harmonisasi antara peraturan perundang-undangan.
- c) Teleologi bertitik tolak pada tujuan terhadap norma.

- 5) Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai pelaksanaan kewajiban oleh industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten.

8. Proses Berfikir

Data yang di peroleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisi yaitu, menganalisis, meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini di pakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN. Bab ini berisi konsep/variable pertama yaitu tinjauan tentang industry mie soun. Konsep/variable kedua yaitu tinjauan tentang limbah dan pencemaran lingkungan. Dan hasil penelitian tentang pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industry mie soun.

BAB III: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan saran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan dan kewajiban dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan industri mie soun di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten untuk lima industri yang penulis temui belum dilakukan dengan baik atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. DLHK telah memberikan penyuluhan mengenai pengelolaan limbah industri sebelum dilakukan pembuangan langsung ke sungai tapi masih belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengendalian dan pemulihan pencemaran akibat limbah industri mie soun belum dapat dilaksanakan karena adanya kendala lahan KAS Desa yang belum mumpuni atau memadai dalam pembuatan IPAL tersebut, serta adanya kandungan kaporit yang terdapat di Desa Manjung, hal tersebut mengakibatkan tidak bisa nya dilakukan pembuuatan IPAL dikarenakan akan memperngaruhi proses pengolahan IPAL, serta tidak adanya sanksi yang nyata dan tegas terhadap para pelaku industri yang telah melakukan pencemaran lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan DLHK Kabupaten Klaten perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan secara rutin kepada para pelaku industri.

2. DLHK Kabupaten Klaten perlu memberikan solusi atas pengelolaan limbah diluar IPAL apabila memang di Desa Manjung benar-benar tidak dapat dilakukan pembuatan IPAL.
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu perlu memberikan penyuluhan kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya mempunyai izin dan agar segera memiliki IUMK.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing), Malang.

N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*.

H. Syamsul Arifin, 2021, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, SOFMEDIA, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang perindustrian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 Tentang izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang ketentuan dan Tata cara pemeberian izin usaha industri.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Internet:

Hestanto, Pengertian Industri, <https://www.hestanto.web.id/pengertian-industri/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

Pengertian, Definisi, Macam, Jenis Dan Penggolongan Industri Di Indonesia, <http://pusatukm.com/pengertian-definisi-macam-jenis-dan-penggolongan-industri-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

Muchilisi Riadi Pengertian dan Jenis-jenis Industri, <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/pengertian-dan-jenis-jenis-industri.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

Mukhlis dan Mustafa lutfi, 2010 *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, setara press (kelompok in- TRANS Publishing), Malang, hlm 86

Izin Usaha Industri, <http://www.legalakses.com/izin-usaha-industri-iui/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

Pengertian Amdal <https://www.zonareferensi.com/pengertian-amdal/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019.

Pengertian Limbah, <https://ilmulingkungan.com/pengertian-limbah/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019.

JenisLimbah,<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39418/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y> diakses pada tanggal 29 Desember 2019.

Dinas Lingkungan Hidup, Giat DLH <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/kerusakan-lingkungan-dan-penyebabnya-36>, diakses 5 Januari 2020

Pengertian pencemaran lingkungan hidup, <https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan>, diakses pada tanggal 5 januari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan> diakses pada tanggal 24 Desember

Polusi suara: Penyebab, contoh, macam, dampak, <https://jagad.id/polusi-suara-penyebab-contoh-macam-dampak/>

Pengertian Remediasi, <https://k-bioboost.blogspot.com/2016/07/pengertian-remediasi-dan-bio-remediasi.html?m=1>

Pengertian rehabilitasi lingkungan hidup, <http://agroindonesia.co.id/2019/11rehabilitasi-reklamasi-restorasi-dan-recovery-hutan/>,

SPPL, <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/13>

Penanggulangan pencemaran air oleh limbah, <https://blog.ruangguru.com/penyebab-dampak-dan-cara-penanggulangan-pencemaran-air>

Lampiran Foto Industri Mie Soun



